

28 Juta Orang Indonesia Berpotensi

Dari Halaman 1

gangguan kesehatan mental. Menurutnya, ini merupakan fenomena gunung es.

"WHO bilang, masalah kejiwaan itu satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang. Jadi, kalau Indonesia 280 juta penduduk, minimal 28 juta punya masalah kejiwaan," ujar Budi, seperti dilansir dari detikhealth.

Adapun berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Kesehatan, kasus gangguan kesehatan mental yang terdeteksi masih rendah. Hal ini terlihat dari laporan cek kesehatan gratis (CKG).

"Dari hasil skrining yang kita lakukan, angkanya masih kecil sekali. Untuk orang dewasa bahkan masih di bawah 1 persen, sementara

pada anak-anak sekitar 5 persen," kata Budi.

Adapun gangguan kesehatan mental yang dilaporkan beragam. Mulai dari depresi, gangguan kecemasan (anxiety disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), hingga yang terberat, skizofrenia.

Meski angka tersebut terbilang rendah, Budi mengatakan bukan berarti masyarakat Indonesia terbebas dari masalah kesehatan mental. Pasalnya, ada banyak kasus yang belum terdeteksi, terlaporkan, bahkan penderitanya banyak yang belum berani mencari pertolongan.

Lalu bagaimana solusi dari Kementerian? Budi mengatakan, saat ini sistem layanan kesehatan jiwa di berbagai puskesmas sedang diperkuat. Kementerian sudah menyiapkan tata laksana

penanganan yang mencakup obat-obatan hingga layanan konseling.

"Kita sedang bangun sistemnya supaya nanti pelayanan kesehatan jiwa bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas," ucap Budi.

Kemenkes berharap upaya ini bisa memperluas akses terhadap layanan kesehatan mental. Tantangan lain yang perlu dijawab, yakni stigma di masyarakat yang masih kuat terkait pengidap gangguan kesehatan mental.

Budi menegaskan, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan mental bisa memengaruhi produktivitas kerja, kualitas hidup, hingga stabilitas sosial masyarakat secara umum.(cnni/js)

Aparat Didesak Proses Hukum 28 Perusahaan

Dari Halaman 1

wilayah adat masyarakat adat bukanlah peristiwa alam yang biasa. Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan perizinan yang mengabaikan aspek lingkungan, menyengkirkan masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan korporasi di atas keselamatan rakyat," kata Sekretaris Eksekutif Bakumus, Junitay Aritonang, Rabu (21/1).

Junitay menegaskan, pencabutan izin ini tidak boleh berhenti sebagai keputusan administratif. Pencautan ini semata tidak dapat menghapus tanggung jawab negara.

Pasalnya dampak kerusakan hutan masih nyata dirasakan oleh masyarakat.

"Salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan kertas ini selama puluhan tahun mengelola hutan yang

mengakibatkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, memicu konflik agraria yang berkepanjangan, kriminalisasi, dan menghilangkan ketahanan pangan serta sumber air masyarakat sekitar," ujarnya.

Pascapencabutan izin ini, Bakumsu menilai pemerintah harus mengembalikannya untuk dikelola masyarakat sebagai ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi komunitas adat.

Momentum pencabutan izin ini harus menjadi titik balik reformasi tata kelola kehutanan yang berpihak pada keadilan ekologis.

"Tanpa pemulihian yang adil, partisipasi bermakna masyarakat dan jaminan agar konflik tidak terulang, keputusan ini berisiko hanya menjadi simbol politik semata," paparnya.

Oleh karena itu, Bakumsu tetap mendesak pemerintah untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukannya pelanggaran lingkungan dan berkontribusi pada

bencana ekologis, termasuk menelusuri pertanggungjawaban korporasi dan aktor pengambil kebijakan.

"Mewajibkan pemulihian ekologis secara menyeluruh dan terukur di wilayah terdampak, dengan mekanisme pengawasan publik yang transparan dan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna, pengembalian dan pengakuan wilayah adat," papar Junitay.

Tak hanya itu, pemerintah harus menjamin pemulihian hak korban, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas penghidupan, serta perlindungan khusus bagi Perempuan, anak dan masyarakat adat yang menghadapi dampak berlapis akibat bencana.

"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin lain di wilayah rawan bencana, penghentian praktik perizinan yang mengabaikan persetujuan masyarakat, serta pengakuan dan perlindungan wilayah kelola masyarakat adat," sebutnya.(ant/js)

Kasus Korupsi Limbah Sawit, Kejagung Geledah

Dari Halaman 1

limbah minyak kelapa sawit pada 2022 yang tengah diusut Kejagung.

"Kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan penggeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing," Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

"Itu terkait dengan penyidikan kita dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata kelola CPO atau POME ya," lanjutnya.

Penggeledahan, kata Syarief, telah dilakukan pada akhir Desember lalu. Namun dia tak merinci detail lokasi money changer yang digeledah. Dia hanya

menyebut ada yang berlokasi di pusat perbelanjaan.

"Waktunya mungkin akhir bulan Desember menjelang tahun baru. Tepatnya di beberapa tempat di Jakarta (Utara dan Selatan). Kebutuhan money changer-nya ada di pusat perbelanjaan," ungkap dia.

Syarief menjelaskan, penggeledahan itu untuk mendalami transaksi dan aliran dana terkait perkara yang diusut. Meski begitu, dia menyetakan belum dapat membeberkan terkait dengan siapa.

"Kami melakukan penggeledahan itu dan itu dalam rangka kami mencari dugaan aliran-aliran dana ke satu atau dua orang melalui tempat penukaran," jelas dia.

"Memang ada aliran uang, dari mana dan ke mananya belum bisa kami buka. Namanya belum bisa kita sampaikan, itu materi penyidikan, tapi terkait langsung dengan konteks penyidikan (POME) itu," terang Syarief.

Dia menyebut sejumlah dokumen turut disita penyidik dalam penggeledahan ini. Namun tidak ada barang bukti mata uang asing disita dari penggeledahan ini.

"Barang bukti yang kami sita adalah berupa dokumen. Karena yang kami cari adalah jejak-jejak transaksi di situ dan yang kami cari adalah dokumen-dokumen yang ada di situ," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kejagung memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022. Kejagung belum benar-benar menjelaskan duduk perkara kasus ini. Hanya, disebutkan perkara ini masih dalam proses penyidikan.

Kejagung sebelumnya juga telah menggeledah lima lokasi terkait kasus ini. Di antara lokasi-lokasi itu, disebutkan ada kantor hingga rumah pejabat Bea Cukai yang turut digeledah. (det/js)

657 Ribu Siswa dan 56 Ribu Guru Jadi Korban

Dari Halaman 1

"Tercatat 4.549 satuan pendidikan terdampak yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 657.193 peserta didik serta aktivitas pembelajaran oleh 56.882 guru," ujar Mu'ti dalam rapat di Komisi X DPR, Rabu (21/1).

Dia menyebut pemerintah telah mengambil langkah cepat. Pihaknya ingin agar para siswa tetap mendapat haknya sebagai peserta didik, kendati dalam situasi darurat.

Hingga saat ini, ujar Mu'ti, pihaknya telah

memberikan 27 ribu paket school kit kepada siswa terdampak.

Kemendikdasmen juga telah mendirikan 168 unit tenda belajar darurat, 147 ruang kelas darurat, dan dana operasional darurat untuk 1.339 satuan pendidikan.

Selain itu, ada pula tunjangan bencana bagi 16.467 guru terdampak, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, dan 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran.

"Semoga seluruh bantuan tersebut dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam

kondisi yang sangat terbatas," katanya.

Sebagai respons cepat, ujar Mu'ti, pihaknya juga telah menerbitkan surat Edaran Menteri berisi petunjuk teknis pembelajaran di daerah terdampak bencana.

Menurut dia, Edaran itu akan menjadi pedoman bagi sekolah untuk tetap beradaptasi memasuki semester genap mulai 5 Januari.

"Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lapangan," katanya.(cnni/js)

RS Martha Friska Batasi Pasien Poliklinik

Dari Halaman 1

Dalam aplikasi Mobile JKN, kuota pendaftaran poliklinik disebut sudah penuh meski satu hari sebelum hari pelayanan.

"Di aplikasi hanya dibuka 14 orang sehari. Kami sebagai pasien PRB sangat dirugikan. Padahal kami diwajibkan pakai Mobile JKN," ujar Suwani kepada wartawan.

Keanehan semakin terlihat saat wartawan mengonfirmasi langsung ke pihak rumah sakit. Humas RS Martha Friska Mutatuli menyebutkan bahwa pendaftaran melalui Mobile JKN memang hanya terlapor 14 orang pada hari tersebut.

Namun, saat diminta menunjukkan data sistem, seorang petugas perempuan memperlihatkan layar pendaftaran yang menunjukkan adanya pasien ke-15 yang baru terdaftar pada pukul 19.00 WIB, di luar jam pelayanan poliklinik.

Fakta ini memunculkan dugaan kuat bahwa sistem pendaftaran bersifat "buka-tutup" dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Apakah pendaftaran memang dibatasi? Hingga berita ini masuk ke meja redaksi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Dr Yasmine, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Padahal, BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh peserta menggunakan aplikasi Mobile JKN

sebagai pintu utama akses pelayanan. Ketika sistem tersebut justru diduga membatasi hak pasien, maka hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Jika praktik pembatasan ini benar terjadi, maka pasien BPJS bukan hanya dirugikan secara administratif, tetapi juga terancam kehilangan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin undang-undang.

Kasus ini pun diharapkan menjadi perhatian serius dari BPJS Kesehatan Pusat, Dinas Kesehatan, dan Ombudsman RI, agar tidak ada lagi diskriminasi dan permainan kuota dalam pelayanan kesehatan.

"Tidak benar Dinas Pendidikan tertutup. Semua tamu kami terima di ruang PPID. Di sana sudah kami siapkan fasilitas yang layak. Dari situ, pejabat atau yang ingin ditemui akan turun langsung," ujarnya.

Io menambahkan, mekanisme ini justru dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan profesional.

Alexander juga menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang masukan dan pengawasan dari media.

"Saya sendiri beberapa kali menerima wawancara, bahkan hadir langsung dalam kegiatan peliputan. Jadi, silakan media datang, melapor ke PPID, dan akan difasilitasi," katanya.

Menurut Alexander, penataan ini sejalan dengan pesan Gubernur Sumatera Utara agar tidak ada lagi praktik-praktik yang menyimpang di lingkungan pendidikan.

"Kalau ada yang salah, kita tegakkan aturan. Tidak ada kepentingan tersembunyi," ujarnya.

Ia mengakui kemungkinan adanya mispersepsi di lapangan, dan untuk itu menyampaikan harapan agar semua pihak dapat saling memahami.

"Kami ingin membangun hubungan kemitraan yang lebih baik dengan media. Media adalah mitra strategis dalam mendorong pendidikan yang bersih dan profesional," kata Alexander.

Dinas Pendidikan Sumut menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi, sekaligus penataan internal demi terciptanya lingkungan kerja yang tertib, akuntabel, dan transparan (A-05/A-09)

Ketua PWI Sumut Ingatkan Kasus Topan

Dari Halaman 1

Farianda heran, karena telah mengenal sosok Alexander Sinulingga yang menjadi ajudan eks Wali Kota Medan Abdillah usai tamat dari STPDN waktu itu.

"Dulu Alex sangat sopan dan santun, tidak sombong atau arogan," ujarnya.

Namun sekarang berbeda setelah memimpin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Karena masyarakat tahu banyak pengaduan masyarakat (dumas) terkait proyek raksasa seputar Alex menjabat Kadis Perkim Citaru Kota Medan," terangnya.

Farianda menyayangkan kepemimpinan Gubsu Muhammad Bobby Nasution, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Herry Antarki dan Kejatuhan Harli Siregar hubungan sangat bagus dengan wartawan.

"Pak Bobby membuat pressroom wartawan. Polda, Kejati dan Kodam I/BB juga sangat harmonis bersama wartawan juga menyediakan buat ruangan bagus untuk wartawan," tegasnya.

"Saya minta kepada adik saya, Alex, jangan begitu sama wartawan. Ketika adinda menjauh dari wartawan, sesungguhnya adinda sedang mengorek lubang yang dalam untuk kuburan sendiri," jelasnya.

Pejabat publik harus siap dikritik dan bersedia memberikan klarifikasi dan konfirmasi terkait pemberitaan di media. Tugas wartawan sebagai sosial kontrol supaya berita itu berimbang harus ada konfirmasi.

"Kalaupun Alex tertutup, maka miring beritanya. Wartawan adalah profesi yang mulia dan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Farianda mengapresiasi Gubsu Bobby Nasution memerintahkan kepada seluruh OPD menyampaikan

Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Alexander menegaskan, kebijakan tersebut berlaku umum, tidak hanya bagi pihak eksternal seperti wartawan, tetapi juga bagi tamu internal, termasuk kepada sekolah dan unsur pendidikan lainnya.

Semua tamu, kata dia, diterima terlebih dahulu di ruang PPID yang berada di lantai satu kantor Dinas Pendidikan.

"Tidak benar Dinas Pendidikan tertutup. Semua tamu kami terima di ruang PPID. Di sana sudah kami siapkan fasilitas yang layak. Dari situ, pejabat atau yang ingin ditemui akan turun langsung," ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme ini justru dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan profesional.

Alexander juga menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang masukan dan pengawasan dari media.

"Saya sendiri beberapa kali menerima wawancara, bahkan hadir langsung dalam kegiatan peliputan. Jadi, silakan media datang, melapor ke PPID, dan akan difasilitasi," katanya.

Menurut Alexander, penataan ini sejalan dengan pesan Gubernur Sumatera Utara agar tidak ada lagi